

## **Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Brebes: Studi Kasus Pabrik Gula Banjaratma Tahun 1983-1992**

Oleh: Astuti Anis Safitri, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [safitria802@gmail.com](mailto:safitria802@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kembali produksi gula dan pendapatan petani dengan cara sistem sewa maupun bagi hasil, namun hal tersebut tidak berhasil meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan tebu melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan tebu rakyat intensifikasi (TRI) yang ditetapkan bahwa pabrik gula tidak perlu lagi menyewa lahan petani dan agar petani mau menanam tebu di atas lahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi gula dan pendapatan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan TRI dan dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Brebes serta pengaruhnya bagi Pabrik Gula Banjaratma itu sendiri. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes merupakan daerah agraris dan mempunyai kepadatan penduduk paling banyak di Jawa Tengah. Hal tersebut ditinjau dari besarnya area pertanian dan perkebunan yang ada. Salah satu alasan diterapkannya TRI dikarenakan mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Kabupaten Brebes dipilih sebagai lahan bagi tanaman komoditi perkebunan terutama tanaman tebu karena memiliki kondisi tanah yang subur serta irigasi yang baik. Selain itu Kabupaten Brebes merupakan daerah wilayah kerja pabrik gula Banjaratma. Selama pelaksanaan program TRI, produktivitas gula mengalami penurunan. Akibatnya pendapatan petani juga rendah sehingga, program TRI telah menimbulkan kerugian bagi petani.

**Kata Kunci:** TRI, Kabupaten Brebes, Banjaratma.

## **Implementation of Popular Sugar Cane Intensification (TRI) in Brebes Regency: Case Study of Banjaratma Sugar Factory in 1983-1992**

### **ABSTRACT**

The Government of Republic Indonesia has made efforts to raise the production of sugar and farmers' income by leasing and productsharing system, but it has not succeeded in increasing farmer's income. Therefore, the government issued a policy of sugarcane development through Presidential Instruction Number 9 Year 1975 on intensification of sugarcane people implementation (TRI) stipulated that sugar factory no longer need to rent farmers land so farmers want to plant sugar cane on their own land. The aim is to increase sugar production and farmers' income. The purpose of this research was to know how the implementation of TRI, its impact for the people of Brebes Regency and its influence for Banjaratma Sugar Factory itself. The research applied the critical history method through the study of the literature. The results of the study show that Brebes Regency is an agricultural area and has the most population density in Central Java. It can be viewed from the magnitude of the farming and plantations area. Dominantly, people work as farmers so, this area qualified to set up TRI. Brebes Regency was chosen as a land for plantation commodity crops, especially sugar cane because it has fertile soil conditions and good irrigation. In addition, Brebes Regency is renowned as *Banjaratma* sugar factory work area. During the implementation of TRI program, sugar productivity decreased. As a result farmers' income is also low so that the TRI program has caused losses for farmers.

**Keywords:** TRI, Brebes regency, Banjaratma.

## PENDAHULUAN

Negara berkembang memiliki pengalaman historis dengan perkembangan kolonialisme pada masa lampau. Tanah jajahan adalah sumber kekayaan bagi negara penjajah. Tersedianya tanah dan tenaga kerja yang murah memungkinkan untuk dilakukan eksploitasi produksi pertanian yang menguntungkan bagi pasaran dunia. Sistem perkebunan dimulai melalui pembukaan penanaman modal dan teknologi dari luar, serta memanfaatkan tanah dan tenaga kerja yang tersedia.<sup>1</sup> Lingkungan perkebunan ini dibentuk oleh kesatuan lahan penanaman tanaman komoditi perdagangan, pusat pengolahan produksi (pabrik), dan komunitas pemukiman penduduk yang terlibat dalam kegiatan perkebunan.

Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda dan menerapkan kebijakan baru yaitu Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*). Pelaksanaan Sistem tanam Paksa yang merugikan rakyat menimbulkan protes dari berbagai kalangan, akhirnya Sistem Tanam Paksa dihapus pada tahun 1870.<sup>2</sup> Ketika Tanam Paksa berakhir, terjadi perubahan politik yakni menjadi politik

---

<sup>1</sup>Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 7.

<sup>2</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 22.

Kolonial Liberal tahun 1850-1870. Pada masa ini Pemerintah Belanda membuka kesempatan bagi para pemodal asing untuk menanam modal di Hindia Belanda.

Gula merupakan salah satu komoditas ekspor penting bagi perekonomian Hindia Belanda. Industri gula menjadi sumber pemasukan yang vital, sehingga Pemerintah Kolonial Belanda mulai membangun pabrik-pabrik gula di Jawa dan memberikan perlindungan serta bantuan politik secara maksimal.<sup>3</sup> Pada tahun 1928 terdapat 178 pabrik gula di Jawa dengan luas areal tebu ditanam kurang lebih 200.000 hektar dan menghasilkan 3 juta ton gula dimana hampir separohnya diekspor.<sup>4</sup> Pada tahun 1931 industri gula mengalami krisis sebagai akibat resesi ekonomi dunia atau yang dikenal dengan krisis *Malaise*, yang mengakibatkan produksi gula di Indonesia terus merosot dimana keadaan ini diperparah dengan pendudukan Jepang dan Revolusi fisik, karena banyak pabrik gula yang rusak dan berhenti berproduksi.<sup>5</sup>

Daerah pusat industri gula berada di Jawa, dan salah satunya adalah Kabupaten Brebes.

---

<sup>3</sup>Jayanto, "Industri Gula di Karesidenan Cirebon Tahun 1870-1930 dan Dampaknya Bagi Masyarakat", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 1.

<sup>4</sup>Mubyarto, dkk., *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 1.

<sup>5</sup>F.G. Winarno dan A.T. Birowo, *Gula dan Pemanis Buatan di Indonesia*, (tt: Sekretariat Dewan Gula Indonesia, 1988), hlm. 13.

Dalam perkebunan tebu tercipta organisasi produksi baru guna menyesuaikan perubahan kondisi pedesaan. Sistem tersebut adalah pemberian kepercayaan kepada petani untuk menjaga tanaman tebu pada lahan yang telah disewakan. Sistem demikian kemudian melahirkan sistem Tebu Rakyat Intensifikasi atau dikenal dengan TRI. Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Brebes khususnya di Pabrik Gula Banjaratma dimulai pada tahun 1983. Pelaksanaan TRI dilakukan secara bertahap dan menggunakan sistem *glebagan*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha mendeskripsikan dan mengkaji pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Brebes: Studi Kasus Pabrik Gula Banjaratma tahun 1983-1992. Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Brebes. Daerah Kabupaten Brebes dipilih sebagai lokasi penelitian sehubungan dengan adanya Pabrik Gula yang berlokasi di Kabupaten Brebes yaitu Pabrik Gula Banjaratma. Secara temporal penelitian ini mengambil titik awal tahun 1983, karena pada tahun 1983 merupakan awal permulaan Pabrik Gula Banjaratma menggiling TRI murni 100%. Tahun 1992 digunakan sebagai batas akhir dimana pada tahun 1992 Pabrik Gula Banjaratma sudah tidak beroperasi.

## METODE PENELITIAN

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau dengan data yang

sudah diperoleh.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan empat tahapan, yakni: *heuristik* (pengumpulan sumber), kritik sumber (*verifikasi*), penafsiran (*interpretasi*), dan penulisan sejarah (*historiografi*). Sumber atau disebut juga data sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.<sup>7</sup> Sumber yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai tempat, seperti perpustakaan dan buku-buku koleksi pribadi peneliti. Sumber sejarah dalam penelitian ini sejarah terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer merupakan sumber yang sejaman dengan peristiwa sejarah, misalnya pelaku atau saksi mata saat kejadian, rekaman, foto-foto asli dan sumber-sumber tertulis langsung yang biasa disebut sebagai arsip. Penelitian ini menggunakan sumber primer yang diperoleh dari berbagai tempat, antara lain:

*Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah No. 9. Berisi Laporan Tahunan PG. Banjaratma Tahun 1983.*

Sumber sekunder adalah kesaksian seseorang yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni seseorang yang tidak hadir pada waktu terjadinya peristiwa.<sup>8</sup> Setelah

---

<sup>6</sup>Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Terj. Nugroho Notosusanto, Cet.4, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 39.

<sup>7</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 73.

<sup>8</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 35.

heuristik dilakukan kritik terhadap sumber yang akan digunakan dalam penelitian yang akan menghasilkan fakta sejarah. Kritik sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern cenderung menguji keaslian fisik dari dokumen-dokumen sejarah, agar diperoleh fakta mengenai asli atau tidaknya suatu sumber. Kritik ekstern digunakan untuk menilai keabsahan sumber, misalnya jenis kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa dan kalimat untuk mengetahui otentitas sumber.<sup>9</sup> Kritik intern merupakan kritik yang cenderung menguji isi dokumen itu sendiri. Apakah isi informasi yang terkandung dalam suatu dokumen benar dan dapat dipercaya, kredibel dan realibel.<sup>10</sup> Fungsi kritik internal adalah menguji keabsahan dari isi sumber untuk memperoleh sumber yang sebenarnya dan tidak dapat diubah oleh suatu pihak atau kelompok untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektivitas. Hal ini sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar, karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh.<sup>11</sup> Interpretasi merupakan tahapan penafsiran atas

fakta-fakta sejarah yang telah didapatkan, penggabungan fakta-fakta saling terkait untuk membentuk suatu kesinambungan fakta yang lebih logis. Tahap ini terdiri dari analisis dan sintesis. Pada analisis merupakan bagian penguraian fakta-fakta dari suatu sumber sejarah. Setelah bukti-bukti dari setiap bagian sumber sejarah didapatkan, maka akan digabungkan dengan suatu proses yakni sintesis. Setelah interpretasi selesai dilakukan tahap akhir yaitu historiografi. Historiografi dalam bentuk karya sejarah.

## HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes

Sejarah perkembangan Kabupaten Brebes tidak terlepas dari sejarah perkembangan kerajaan Mataram dan Indonesia. Daerah Brebes merupakan fasal dari Mataram pada masa Kerajaan Mataram. Pada tahun 1670-an daerah Brebes belum menjadi sebuah daerah kabupaten sendiri, melainkan masih bergabung dengan daerah Losari dan Tegal dalam sebuah kabupaten. Pada tanggal 17 Januari 1678 terjadilah perang darah antara Adipati Martapura melawan Adipati Arya Martalaya. Hal ini terjadi ketika Adipati Martapura mendekati Adipati Arya Martalaya, beliau sudah mengetahui maksud dan tujuannya. Pada masa Amangkurat II, Brebes menjadi sebuah Kabupaten yang berdiri sendiri dibawah pemerintahan Bupati Tumenggung Arya Suralaya, yang jatuh pada tanggal 18 Januari 1678 sekaligus ditetapkan

---

<sup>9</sup>Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 77.

<sup>10</sup>A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 66.

<sup>11</sup>Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 78.

sebagai Hari Jadi Kabupaten Brebes. Sejak tahun 1824 wilayah Kabupaten Brebes telah menjadi bagian dari Kabupaten Tegal. Karesidenan ini mencakup 3 wilayah *regentschap* yaitu Kabupaten Pemalang yang dipimpin oleh Raden Adipati Reksadiningrat, Kabupaten Tegal dipimpin oleh Bupati Aria Reksonegoro dan Kabupaten Brebes dipimpin oleh Bupati Adipati Singasari Panatayuda. Sebagai bagian dari wilayah Karesidenan Tegal, Kabupaten Brebes terdiri atas 4 distrik, yaitu:

1. Distrik Brebes membawahi Kempang dan Geblook.
2. Distrik Bumiayu membawahi Karangmangu, Cibunar, Bulurangkang, Limbangan, Blimbing, Wanalaba, Kemetjing, Gegergedung, Batu Iring, Songem, Kutamendalo, Setjoko, Pertambakan, Kelabasa, Katiwadas, Gunungbanjaran, Timbang dan Kebunjati.
3. Distrik Lebaksiu membawahi Gunungtumping, Pagupakanwarak, Pagerwangi, Kaiyukobang, dan Sirekot.
4. Distrik Salem membawahi Pagebatang dan Gununggarong.

Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sebesar 1.662,96 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 17 kecamatan, yaitu: Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampong, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom,

Jatibarang, dan Brebes.<sup>12</sup> Wilayah Kabupaten Brebes terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan yang merupakan daerah pantai, 9 kecamatan daerah dataran rendah dan 3 kecamatan dataran tinggi, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun teh, dan kebun lainnya. Kabupaten Brebes terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan pantai. Daerah perbukitan mempunyai ketinggian 11 m - 875 m dari permukaan laut. Di bagian Utara yang merupakan daerah pantai dan dataran rendah memiliki kemiringan antara 0-2%, sedangkan di bagian Selatan yang merupakan daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat bervariasi antara 2-50%.

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak diantara 6° 44'56,5"-7° 21'51,48" Lintang Selatan dan 108° 41'37,7"-109° 11'28,92" Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Brebes terletak pada ketinggian 3 km diatas permukaan laut. Kabupaten Brebes memiliki batas wilayah yaitu:<sup>13</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

---

<sup>12</sup>*Kabupaten Brebes Dalam Angka: Brebes Regency in Figures 2013, op.cit., hlm. 6.*

<sup>13</sup>*Laporan Monografi dan Data Statistik Tahun 1976, (Brebes: Kabupaten Tingkat II Brebes, 1976), hlm. 2.*

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

Intensitas perkebunan, persawahan, dan bidang agrarian lainnya akan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Meskipun secara keseluruhan didominasi oleh pertanian namun intensitas jumlahnya area pertanian setiap daerah mengalami perbedaan. Berdasarkan data Kabupaten Brebes dalam Angka Tahun 1993 kabupaten Brebes pada tahun 1983 penduduknya berjumlah 1.306.394 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 633.257 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 673.137 jiwa.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penduduk wanita lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

Dalam tatanan sosial masyarakat Brebes terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan mata pencaharian mereka. Secara umum dapat dilihat pembagiannya, misalnya saja kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, dan kelompok pegawai. Kelompok petani merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai pengolah sawah dan biasanya tinggal di kawasan pedesaan terutama di kawasan sekitar area persawahan, sedangkan kelompok nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai yang biasanya berprofesi sebagai penangkap ikan maupun pengelola tambak perikanan. Berbeda halnya dengan

kelompok pedagang dan pegawai, masyarakat ini biasanya tinggal secara acak, misalnya pedagang hampir ada di setiap wilayah, terutama yang dekat dengan pusat perdagangan, sedangkan kelompok pegawai biasanya juga secara keseluruhan tinggal pada daerah yang dekat dengan kantor pemerintahan sesuai dengan pembagian wilayah pemerintah di Brebes.

Berdasarkan mata pencahariannya, masyarakat di Kabupaten Brebes dikategorikan sebagai masyarakat yang homogen, karena terdapat bermacam-macam jenis mata pencaharian, namun pada dasarnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman pokok yang ditanam di Kabupaten Brebes adalah tanaman padi dan tanaman palawija (kacang tanah, kedelai, singkong, jagung, ubi dan bawang merah). Selain tanaman pokok, terdapat juga tanaman perkebunan yang diusahakan di sawah-sawah petani, seperti tebu, kopi dan serai. Dapat dikatakan bahwa bekerja di dalam sektor pertanian merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh anggota masyarakat pedesaan di Brebes.

Bidang pertanian dalam masyarakat Kabupaten Brebes merupakan suatu mata pencaharian penduduk yang sangat mudah dijumpai. Kawasan pertanian dapat dijumpai pada beberapa tempat yang hampir di seluruh kawasan kecamatan yang ada di Brebes. Komoditi dari persawahan belum tentu berupa tanaman padi saja. Dalam pengenalan mengenai jenis-jenis sawah, di Kabupaten Brebes terdapat

---

<sup>14</sup>*Kabupaten Brebes Dalam Angka 1993*, (Brebes: Kantor Statistik Kabupaten Brebes, 1993), hlm. 74.

beberapa jenis sawah yang diklasifikasikan menurutmenurut kondisi geografis.

## **B. Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Brebes Tahun 1983-1992**

Sebelum tahun 1975 sebagian pabrik gula dalam mengusahakan tanaman tebu milik rakyat dengan menggunakan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami kesukaran, karena di satu pihak petani pemilik tanah harus memberikan pengorbanan, sementara di lain pihak pabrik gula harus memberikan pendapatan kepada negara. Dalam hal ini bukan hanya mempertimbangkan aspirasi produsen saja, melainkan juga mempertimbangkan aspirasi konsumen gula.<sup>15</sup>

Pemerintah mengadakan perubahan struktural dalam organisasi industri gula melalui Inpres No. 9 tahun 1975. Perubahan yang mendasar adalah bahwa semula pabrik gula menjadi penguasa tunggal dalam penanaman dan penggilingan tebu berubah fungsinya sebagai penggiling saja. Adanya Inpres tersebut pengusaha tanaman tebu seluruhnya diserahkan kepada petani dengan memelihara sendiri tanamannya secara intensif di atas tanah miliknya sendiri, petani diharapkan bersungguh-

---

<sup>15</sup>Selo Soemardjan, dkk, *Petani Tebu Laporan Penelitian Tentang Masalah-Masalah dalam Pelaksanaan Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat*, (Tanpa Kota: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan Dewan Gula Indonesia, Tanpa Tahun), hlm. 53-54.

sungguh dalam mengelola tanamannya sebagaimana yang mereka lakukan pada waktu bercocok tanam padi atau palawija, sehingga hasil produksi gula meningkat. Peningkatan hasil produksi merupakan peningkatan pendapatan bagi petani.<sup>16</sup>

Pelaksanaan Program TRI yang berlandaskan Inpres No. 9 Tahun 1975 masih menghadapi kendala operasional, antara lain tumpang tindihnya penjabaran tugas dan fungsi aparat yang disebabkan oleh perbedaan persepsi dan kepentingan masing-masing. Disamping itu, pengaturannya juga cenderung mengarah kepada sistem birokrasi dan dianggap sulit oleh petani. Meskipun telah diadakan penyempurnaan ketentuan-ketentuan program, namun masih belum cukup memberikan kemudahan yang diinginkan petani. Dalam pelaksanaannya, TRI juga melibatkan beberapa pihak, meliputi:<sup>17</sup>

1. Petani, sebagai pemilik lahan dan pelaksanaan penanaman tebu.
2. Pabrik gula, sebagai penyelenggara pengolahan tebu menjadi gula, dan bekerjasama dengan dinas perkebunan dalam melakukan bimbingan di lapangan.
3. BRI, sebagai pemberi dana kredit.
4. KUD, sebagai penyedia sarana produksi.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

<sup>17</sup>Dewan Gula Indonesia, *Evaluasi Pelaksanaan Program Swasembada Gula Tahun 1990*, (Surabaya: Departemen Pertanian Republik Indonesia: Sekretariat Dewan Gula Indonesia, 1990), hlm. 69.

Daerah penanaman tebu wilayah pabrik gula Banjarnegara tidak hanya di wilayah Kabupaten Banjarnegara, namun daerah penanaman juga berkembang di wilayah sekitar Kabupaten Banjarnegara, seperti di Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan. Daerah penanaman tebu meliputi beberapa daerah antara lain:<sup>18</sup>

1. Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari 10 kecamatan, yaitu kecamatan Banjarnegara, Wanaseri, Jatibarang, Tanjung, Losari, Bulakamba, Kersana, Banjarnegara, Ketanggungan dan Larangan.
2. Kabupaten Kendal yang terdiri dari dua wilayah Kawedanan, yaitu wilayah Kawedanan Kendal dan Kawedanan Weleri. Dalam wilayah Kawedanan Kendal daerah usahanya, meliputi Kecamatan Kendal dan Kecamatan Patebon. Wilayah Kawedanan Weleri, meliputi Kecamatan Weleri, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Cepiring.
3. Kabupaten Tegal.
4. Kabupaten Pemalang.
5. Kabupaten Pekalongan.

Lokasi penanaman tebu dipilih berdasarkan iklim dan tanahnya cocok untuk tanaman tebu agar memudahkan dalam pengangkutan hasil produksi. Lokasi yang strategis dan dekat dengan pabrik gula juga menjadi salah satu alasan dipilih daerah-daerah

tersebut. Adapun peserta pelaksanaan TRI adalah sebagai berikut:

1. Petani pemilik tanah yang mengusahakan tanaman tebu pada sawah miliknya sendiri.
2. Pemegang tanah bengkok desa yang mengusahakan tanaman tebu.
3. Penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah atau pemegang tanah bengkok desa yang disahkan oleh kepala desa dengan ketentuan tanah garapannya termasuk tanahnya sendiri tidak lebih dari 2 Ha.
4. Perorangan, sekelompok orang, petugas negara dan badan usaha yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik orang lain yang disewanya, tidak diperkenankan menjadi peserta TRI.<sup>19</sup>

Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) adalah perusahaan tebu rakyat yang diatur sebagai salah satu program intensifikasi pertanian dengan pola intensifikasi khusus, yaitu intensifikasi yang dilakukan dalam kaitan kerjasama kelompok tani pada suatu hamparan usaha tani guna untuk memanfaatkan potensi lahan daya dan dana secara optimal dengan menerapkan teknologi anjuran. Teknologi anjuran TRI adalah saptas usaha intensifikasi tebu rakyat, yang memiliki tujuh usaha strategis intensifikasi dalam bercocok tanam tebu, antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hotman M. Siahaan, *Skema Tebu Rakyat Intensifikasi dan Perubahan Struktur Sosial Petani*, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 3.

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Kasturi pada tanggal 4 Mei 2018.

1. Pemakaian bibit yang berasal dari Kebun Bibit datar (KBD) dengan jenis unggul.
2. Penggarapan tanah tanaman pertama di lahan sawah dengan sistem *reynoso*<sup>21</sup> dan di lahan kering dengan sistem penanaman tebu di lahan kering, serta penggarapan tanah tanaman kedua menurut sistem *keprasan*<sup>22</sup> tebu di lahan sawah dan lahan kering dengan ketepatan waktu tanam.
3. Penggunaan pupuk sesuai dengan sifat tanah dan kebutuhan tanaman.
4. Pemeliharaan dan perlindungan tanaman dari gulma, hama dan penyakit yang merugikan.
5. Pengaturan air disesuaikan dengan kebutuhan tanamann
6. Penebangan dan angkutan yang menjamin seluruh hasil tebu layak giling, diterima oleh pabrik gula.
7. Pengolahan hasil yang tepat guna.

Pabrik Gula Banjartma sebagai perusahaan pembimbing adalah penanggung jawab operasional dan pimpinan kerja pelaksanaan budidaya tebu di wilayah kerjanya di Kabupaten Brebes. Pabrik gula dengan fungsinya sebagai pemimpin kerja lapangan disebut sebagai PKOL (Pimpinan Kerja Operasional Lapangan). Untuk keberhasilan program TRI diupayakan agar sebanyak mungkin perusahaan pembimbing berpartisipasi dalam program intensifikasi pertanian sesuai dengan fungsinya.<sup>23</sup> Dalam hubungan dengan petani, kerjasama perusahaan pembimbing dengan kelompok tani terutama diarahkan pada kegiatan meningkatkan mutu intensifikasi dan kegiatan pelayanan sarana produksi, kredit, kelancaran pasca panen dan pemasaran. Dari tahun 1983 Kabupaten Brebes khususnya Pabrik Gula Banjartma mulai melaksanakan TRI Murni. Hal ini dapat dicapai berkat pembinaan dan bantuan dari semua pihak yang sudah berperan dalam pelaksanaan program TRI. Sudah tentu, keberhasilan penambahan luas areal

---

<sup>20</sup> Jati Isnanto, "Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten 1975-1997", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 56-57.

<sup>21</sup> Sistem *reynoso* adalah nama suatu sistem pembukaan tanah untuk tanaman tebu yang menggunakan garbu, cangkul dan lempak. Pada prinsipnya, sistem ini membuat got-got untuk pembuangan dan penampungan air. Tujuan diterapkannya sistem *reynoso* adalah sebagai pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah besar di Jawa yang sudah terlibat dalam pertanian padi dan diusahakan secara intensif. Sistem ini dikemukakan oleh Ronaldo Reynoso dari Kuba dan mulai diterapkan di pulau Jawa sejak tahun 1863.

<sup>22</sup> Sistem *keprasan* merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam memanen tanaman tebu dengan cara di kepras, dan tanpa digantikan dengan tanaman baru. Tanaman tebu yang berasal dari tanaman yang telah dipanen sebelumnya, kemudian tunggul-tunggulnya dipelihara kembali hingga menghasilkan tunas-tunas baru yang akan tumbuh menjadi tanaman baru pada musim tanam berikutnya. Sistem ini bertujuan untuk menghemat biaya dan tenaga. Sistem *keprasan* sebaiknya hanya dilakukan sekali saja, karena dapat mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas pada tanaman tebu.

---

<sup>23</sup> Mubyarto dan Daryanti, *op.cit.*, hlm. 48.

tersebut juga tergantung pada pendapatan petani pada tahun 1982, dimana pada saat itu pendapatan petani dari TRI lebih memadai daripada pendapatan komoditi yang lain, seperti bawang merah, palawija, padi dan lain-lain. Produksi gula di Pabrik Gula Banjartma mengalami pasang surut, dengan dikeluarkannya Inpres No. 9 tahun 1975 sebagai kebijakan baru dalam bidang industri gula. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, maka terjadi perubahan fundamental dalam sistem produksi gula di Indonesia. Sebelum tahun 1981 peran pabrik gula masih ikut mengelola lahan tebu milik petani dan memberikan pembelajaran kepada petani yang lahannya diikutkan dalam penetapan areal TRI. Akan tetapi, pada tahun 1981 sampai seterusnya peran pabrik gula hanya sebagai perusahaan pembimbing. Tujuan dari Inpres No. 9 Tahun 1975 yaitu memenuhi kebutuhan gula dalam negeri yang akan menjadikan Indonesia berswasembada gula.

Hasil produksi tebu rakyat di Pabrik Gula Banjartma mengalami pasang surut. Mengenai produksi tebu untuk tahun 1983 menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 1982 yaitu dari 803 Ku/Ha menjadi 693 Ku/Ha.<sup>24</sup> Perlu diketahui bahwa pada tahun 1982 PG Banjartma masih melaksanakan TRI Jasa. Banyak sedikitnya hasil produksi gula tergantung dari beberapa faktor, diantaranya adalah produksi tebu per hektar, rendemen yang

dicapai, hablur per hektar, lua tanmaan tebu dan kondisi pabrik gula. Apabila rendemen tinggi maka hasil yang dicapai juga akan lebih tinggi. Selain itu mengalami penurunan, hal ini terjadi karena sulitnya partisipasi petani dalam menanam tebu. Hasil produksi TRI mengalami pasang surut dan cenderung mengalami penurunan, hal itu disebabkan selain keengganan petani menanam tebu juga karena petani lebih memilih komoditi lain yang lebih menguntungkan.

### **C. Dampak Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Brebes**

Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) sebagai program baru kehadirannya dianggap asing oleh para petani karena program tersebut berbeda jika dibandingkan dengan sistem sewa. Adapun program TRI petani harus memikirkan langkah berikutnya agar bisa menjalankan program itu sebaik mungkin. Program TRI dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan produksi nasional, dan produktivitas tebu serta penghapusan sistem sewa.<sup>25</sup> Pada prinsipnya program TRI adalah mendidik petani untuk mandiri dan profesional. Pelaksanaan program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Brebes berjalan kurang lebih selama 20 tahun. Kehadiran program TRI tersebut membawa

---

<sup>24</sup>*Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah No. 9.* Berisi Laporan Tahunan PG. Banjartma Tahun 1983.

---

<sup>25</sup>Selo Soemardjan, dkk., *op.cit.*, hlm. 19-20.

dampak di bidang sosial dan ekonomi bagi kehidupan petani dan sekitarnya serta berpengaruh pada hasil produksi gula di Pabrik Gula Banjaratma.

Dalam sistem TRI hubungan kerjasama antara petani dan pabrik-pabrik gula sangat perlulebih dipererat. Sebab, pada akhirnya pabrik harus menggiling tebu petani dengan bagi hasil, sehingga pabrikpun berkepentingan melihat hasil tebu yang semakin meningkat. Sementara itu, petani juga harus menyadari bahwa tanpa pabrik gula, hasil tebu mereka juga tidak dapat digiling. Kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan menjadi kunci keberhasilan program TRI.<sup>26</sup>

Dilaksanakannya sistem TRI telah terjadi perubahan fungsi dan status petani dalam sistem pengusahaan tebu dan industri gula di Indonesia. Sebelum dilaksanakannya sistem TRI petani berada pada pihak yang kurang terlibat dalam proses produksi, karena peran petani hanya menyediakan tanah untuk disewa oleh pabrik gula untuk ditanami tebu.<sup>27</sup> Adapun setelah dilaksanakannya sistem TRI peran petani menjadi lebih aktif dalam proses produksi, karena timbul semacam kewajiban bagi petani untuk menanam tebu atas nama mereka sendiri. Sistem yang dijalankan dalam program TRI mengindikasikan adanya pelimpahan tanggung

jawab pabrik gula, yang semula dari pabrik gula ke petani yang belum menguasai teknologi penanaman tebu secara maksimal. Petani harus mempersiapkan lahan, menanam bibit, memelihara, menebang, dan membawa tebu ke pabrik gula. Selain itu, petani TRI harus mengajukan kredit kepada BRI untuk dapat menjalankan usaha tani tebunya. Paket kredit yang disediakan pemerintah terdiri atas *COL (Cost of Living)*, biaya garap tanah, sarana produksi, serta biaya tebang dan angkut.

Dilaksanakannya program TRI secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Brebes. Salah satu pengaruh yang dirasakan adalah terbentuknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak hanya dari wilayah Kabupaten Brebes itu sendiri, melainkan juga bagi masyarakat sekitar Kabupaten Brebes. Dalam proses pelaksanaan TRI selain menggunakan teknologi mesin, juga menggunakan tenaga kerja atau tenaga manusia dalam proses produksinya. Pekerjaan yang biasanya dilakukan seperti pembajakan lahan yang akan digunakan dalam penanaman tebu, perawatan tanaman tebu seperti pemupukan, pembersihan hama, hingga proses pemanenan tebu seperti pemotongan tanaman tebu, pengangkutan dari lahan ke pabrik dan proses penggilingan.

Keengganan petani untuk menanam tebu adalah permainan pihak pabrik gula dalam menentukan kandungan rendemen tebu. Masyarakat yang telah menanam tebu sesuai

---

<sup>26</sup>Mubyarto, "Tebu Rakyat Intensifikasi: Prospek dan Masalahnya", *Prisma*, No. 10, Jakarta: LP3S, 198, hlm. 57.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

dengan prosedur, harus menerima kekecewaan setelah tebu yang ditanam memiliki kandungan rendemen rendah. Rendemen tebu yang sebenarnya tinggi, dikatakan rendah oleh pihak pabrik. Permasalahan lain yang timbul adalah bahwa petani tidak tahu kaitannya dengan rendemen hanya pabrik gula saja mengetahuinya.<sup>28</sup> Padahal pembagian produksi atau bagi hasil harus didasari oleh rendemen, jika petani tidak mengetahui rendemen maka akan timbul adanya kecurangan dalam pembagian hasil produksi. Hal ini menimbulkan bahwa penetapan program TRI dapat dikatakan tidak berjalan lancar.

Bagi hasil gula yang diterima petani dihitung berdasarkan rendemen sementara dikalikan berat tebu petani dikali ratio bagi hasil. Ratio bagi hasil gula antara petani dengan pabrik penggiling yang ditetapkan bersifat progresif, semakin tinggi rendemen yang didapat maka semakin besar pula ratio bagi hasil petani. Jika rendemen yang didapat antara 6-7% bagi hasil gula petani sebesar 66% dan pabrik gula mendapat 34%. Jika rendemen yang didapat 7-8% bagi hasil gula petani sebesar 68% dan pabrik gula sebesar 32%. Sedangkan rendemen yang didapat lebih dari 8% maka bagi hasil gula petani sebesar 70% dan pabrik gula 30%.<sup>29</sup> Selain mendapat bagi hasil

gula, petani juga mendapat bagian tetes tebu dari hasil panen tebunya. Dari setiap 100 kg tebu petani yang digiling, petani mendapat 3 kg tetes.

Adanya krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan industri gula mengalami penurunan, karena tidak mampu lagi memenuhi pasokan bahan baku tebu, sehingga ada beberapa pabrik gula yang ditutup atau diamalgamasi. Amalgamasi merupakan penutupan sementara pabrik. Namun, pada tahun 1990-an Pabrik Gula Banjartama memang sudah mengalami kegoncangan dalam kemerosotan hasil produksi gula. Adapun faktor-faktor penyebab Pabrik Gula Banjartama mengalami penutupan yaitu:<sup>30</sup>

1. Selalu mengalami kerugian, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor manusia, kepemimpinan dan kedisiplinan.
2. Sulitnya mencari lahan untuk penanaman tebu, dikarenakan petani sempat mengalami kehancuran yang disebabkan sejak diterapkannya sistem TRI.
3. Semakin langkanya pasokan bahan baku tebu dari petani, sehingga kapasitas giling pabrik tidak pernah terpenuhi.
4. Adanya rehabilitasi pabrik gula supaya mencapai hasil yang lebih baik, tetapi kesulitan mencari lahan untuk menanam tebu. Sehingga, biaya untuk produksi habis digunakan untuk pembelian bahan bakar dan biaya angkut.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Rojak pada tanggal 16 Maret 2018.

<sup>29</sup>Chandra Indrawanto, dkk, *Budidaya dan Pasca Panen Tebu*, (Jakarta: ESKA Media Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2010), hlm. 33.

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Main pada tanggal 3 Mei 2018.

5. Kondisi mesin yang sudah tua.

Selama kurun waktu 1990 sampai 1997 tidak ada aktivitas yang berarti di Pabrik Gula Banjaratma, karena pabrik gula mulai *diamalgamari*. Mengenai karyawan Pabrik Gula Banjaratma bagi karyawan yang masa kerjanya 20 tahun ke atas maka diadakan pensiunanmassal, sementara bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 20 tahun masih diperkerjakan dengan pengalihan kerja ke Pabrik Gula Jatibarang maupun ke Pabrik Gula Pangkah.<sup>31</sup>

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Brebes berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan agar petani mengusahakan tanaman tebu di atas tanah miliknya dan pabrik gula tidak perlu menyewa tanah milik rakyat akan tetapi pabrik gula berperan sebagai pengolah hasil panen tebu petani. Melalui program TRI diharapkan petani pemilik tanah mau bekerja di tanah miliknya masing-masing, sebagaimana yang mereka lakukan pada waktu bercocok tanam padi atau palawija. Dilaksanakannya Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Brebes sejak Tahun 1975, perkembangan produksi gula di Pabrik Gula Banjaratma secara keseluruhan di Kabupaten Brebes menunjukkan peningkatan. Akan tetapi peningkatan produksi tersebut disebabkan oleh meningkatnya areal penanaman

tebu dan bukan karena meningkatnya produksi gula per hektar seperti yang diharapkan dalam tujuan Inpres Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi.

Dalam perkembangannya Pabrik Gula Banjaratma semenjak melaksanakan program TRI pada tahun 1983-1992 produktivitas banyak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan tanaman semakin kurang intensif dan perluasan areal ke lahan marginal (tegalan dan sawah tadah hujan). Selain itu, sebagian para petani juga menolak dengan adanya program TRI dengan berbagai alasan. Alasan utama yang menjadi pertimbangan adalah hasil yang diterima oleh petani jauh dari harga padi sawah, dan adanya masalah teknis dari penanaman tebu musim tebang sering tidak tepat waktu atau mundur sehingga mengakibatkan penurunan produksi gula. Menanam tebu yang membutuhkan waktu panen yang cukup lama juga menjadikan alasan petani enggan menanam tebu, sehingga petani memilih tanaman subsistensi mereka yang cepat menghasilkan uang dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memanennya.

Pelaksanaan program TRI melibatkan berbagai pihak yang menjalankan fungsinya masing-masing untuk menyukseskan program tersebut. Yaitu Satuan Pelaksana (Satpel) Bimbingan Massal (Bimas) sebagai pelaksana, BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang memberikan Kredit, KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai penyalur sarana produksi, dan pabrik gula yang

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

memberikan bimbingan terkait dalam mekanisme pelaksanaan program TRI. Akan tetapi, keterlibatan berbagai pihak seringkali menimbulkan permasalahan seperti terlambatnya pencairan dana kredit. Selain itu, dalam hierarki program TRI, petani justru memiliki kekuasaan yang paling lemah jika dibandingkan dengan pihak lain.

Adanya krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan industri gula mengalami penurunan, karena pabrik gula tidak mampu lagi memenuhi pasokan bahan baku tebu, sehingga ada beberapa pabrik gula yang ditutup atau diamalgamasi. Amalgamasi merupakan penutupan sementara pabrik. Namun, pada tahun 1990-an Pabrik Gula Banjartama memang sudah mengalami kegoncangan dalam kemerosotan hasil produksi gula. Mengenai karyawan Pabrik Gula Banjaratma bagi karyawan yang masa kerjanya 20 tahun ke atas maka diadakan pensiunan massal, sementara bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 20 tahun masih diperkerjakan dengan pengalihan kerja ke Pabrik Gula Jatibarang maupun ke Pabrik Gula Pangkah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Arsip:

*Arsip Dinas Kearsipan dan perpustakaan Jawa Tengah NO. 9. Berisi Laporan Tahunan PG. Banjaratma Tahun 1983.*

### B. Buku:

Chandra Indrawanto, dkk, *Budidaya dan Pasca Panen Tebu*, Jakarta: ESKA Media Pusat

Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2010.

Daliman. A, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Dewan Gula Indonesia, *Evaluasi Pelaksanaan Program Swasembada Gula Tahun 1990*, Surabaya: Departemen Pertanian Republik Indonesia: Sekretariat Dewan Gula Indonesia, 1990.

Hiroyosi, kano, dkk, *Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20*, Yogyakarta: UGM Press, 1996.

Hotman M. Siahaan, *Skema Tebu Rakyat Intensifikasi dan Perubahan Struktur Sosial Petani*, Yogyakarta: Tanpa Penerbut, Tanpa Tahun.

*Kabupaten Brebes Dalam Angka: Brebes Regency in Figures 2013*, Brebes: Biro Pusat Statistik, Kantor Statistik Kabupaten BAPPEDA Kabupaten Brebes, 2013.

*Kabupaten Brebes Dalam Angka 1993*, Brebes: Kantor Statistik Kabupaten Brebes, 1993.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

*Laporan Monografi dan Data Statistik Tahun 1976*, Brebes: Kabupaten Tingkat II Brebes, 1976.

Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Terj. Nugroho Notosusanto, Cet.4, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.

Mubyarto, "Tebu Rakyat Intensifikasi: Prospek dan Masalahnya", *Prisma*, No. 10, Jakarta: LP3S, 1981.

\_\_\_\_\_ dan Daryanti, *Gula: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

\_\_\_\_\_, *Masalah Industri Gula di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gajah Mada, 1984. \_\_\_\_\_, dkk., *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1982.

\_\_\_\_ dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

#### D. Daftar Informan (Wawancara)

No	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan		Alamat
			Dulu	Sekarang	
1	Bapak Rojak	66	Staf Keamanan (Satpam) PG Banjaratma	Petani dan Pedagang	Gang Batara 1 RT. 06/ RW. 09, Bulakamba, Banjaratma
2	Bapak Katuri	53	Mandor Tanaman PG Banjaratma	Mandor Tanaman PG Jatibarang	Tanjung Sari, Banjaratma
3	Bapak Main	66	Pensiunan Instalasi Bag. PG Banjaratma	Dukun	Gang Jambu, RW.01, Bulakamba, Banjaratma

Yogyakarta, 1 Oktober 2018

Dosen Pembimbing TAS

Ririn Darini, M. Hum.  
NIP. 19741118 199903 2 001

Reviewer

Dina Dwikurniarini, M. Hum.  
NIP. 19571209 198702 2 001